

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, Penulis mengeneralisasi terkait normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirate Arab dengan adanya Perjanjian Abraham Accords yang mana dalam perjanjian ini cukup berbeda dengan perjanjian damai Israel dengan Mesir dan Yordania, Uni Emirat Arab tidak pernah dalam keadaan perang dengan Israel, dan kepentingan regional dan opini publik telah bergeser jauh dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, berbeda dengan “perdamaian dingin” antara Mesir dan Yordania, hubungan informal Israel selama beberapa dekade dengan Uni Emirat Arab telah dengan tepat mempersiapkan kedua negara untuk “perdamaian hangat” yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perubahan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab menggambarkan bagaimana tiga faktor mendasar bertemu sebagai peluang sempurna bagi Israel dan Uni Emirate Arab untuk secara resmi membuka hubungan diplomatik pada Agustus 2020, termasuk perubahan keamanan, peran Amerika Serikat, dan penyebab Palestina. Sementara meningkatnya ancaman Iran dan kapasitas Amerika Serikat sebagai broker dan sekutu berharga dalam memajukan momentum menuju normalisasi deal dengan meningkatkan manfaat untuk peluang kerja sama, waktu yang tepat dari perjanjian itu adalah hasil dari aneksasi

Potensi perdamaian hangat antara Israel dan Uni Emirate Arab dalam pembukaan hubungan diplomatik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pembukaan hubungan diplomatik Israel dan Uni Emirate Arab adalah hasil mediasi dari

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam Perjanjian Abraham. Dan juga menjadi salah satu alasan Uni Emirate Arab untuk dapat membuka hubungan diplomatik terhadap Israel dengan tujuan untuk menghentikan aneksasi Israel di wilayah tepi barat Palestina.

Selain dari pada itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama antara Israel dan Uni Emirate Arab yang menyangkut dengan kepentingan Nasional, Politik, Keamanan, dan juga Ekonomi. Sehingga, normalisasi yang dilakukan antar kedua negara tersebut tentunya akan mendapatkan respon positif maupun negatif dari negara-negara muslim yang berada di Kawasan Timur Tengah.

Respon pertama terkait kepentingan politik Uni Emirate Arab dalam normalisasi ini, lebih banyak dipengaruhi oleh posisinya di poros kekuasaan politik (*political axes of power*), di mana Uni Emirate Arab dan Israel merupakan negara yang pro-Amerika Serikat. Di bidang keamanan, Uni Emirate Arab yang memiliki persepsi adanya ancaman dari pihak Iran, merasa perlu menjalin kerja sama keamanan, terutama pembelian senjata, dengan Israel yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dan industri militer. Uni Emirate Arab mengkhawatirkan pengaruh Iran akan terus meluas hingga ke Kawasan Teluk Arab. Sehingga negara-negara kecil seperti Uni Emirate Arab dalam memperkuat keamanannya nasionalnya perlu untuk membentuk aliansi, meningkatkan kemampuan militer, dan terlibat dalam kerja sama dengan negara lainnya.

Di bidang ekonomi, Uni Emirate Arab berharap normalisasi dengan Israel dapat meningkatkan ekonominya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa Israel memiliki kepentingan yang lebih besar ketimbang Uni Emirate Arab. Uni Emirate Arab

juga melihat kerjasama ekonomi dengan Israel dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat anjloknya harga minyak mentah dunia, serta sebagai upaya untuk diversifikasi pendapatan negara.

Respon selanjutnya, mengenai perbedaan pandangan dari berbagai negara, khususnya negara-negara Muslim Kawasan Timur Tengah. Sebagian negara Muslim merespons dengan positif, seperti Mesir, Yordania, Bahrain, dan Sudan. Alasan negara-negara ini adalah karena menghargai upaya Uni Emirate Arab dan Israel untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Pemerintah Uni Emirate Arab pun menyatakan masih konsisten mendukung Palestina dengan solusi dua negara dan menyatakan bahwa normalisasi ini sebagai upaya negaranya untuk menahan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel.

Namun disisi lain, beberapa negara seperti Iran, Qatar, Turki, Aljazair, dan Palestina sendiri merespons dengan negatif. Sebagai tanggapan atas normalisasi ini, mereka mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memperkuat dukungan terhadap Palestina secara finansial dan memperkuat keamanan mereka. Bentuk lain atas ketidaksetujuan ini di antaranya juga disampaikan melalui pernyataan resmi negara. Di beberapa negara juga ditemukan aksi protes dari masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi untuk menentang normalisasi ini.

5.2. Saran

Secara geografis wilayah Timur Tengah juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya konflik yang berkepanjangan dengan Israel, karena Israel merupakan sebuah negara minoritas yang berada ditengah-tengah mayoritas negara Muslim. Sehingga, wilayah Timur Tengah sendiri merupakan Kawasan yang cukup Strategis dalam persaingan

ekonomi, keamanan, dan politik di wilayah Kawasan.

Maka tentu upaya normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirate Arab harus menjadi barometer tersendiri bagi stabilitas keamanan di wilayah Timur Tengah, namun tidak melupakan prinsip utama dalam mengawal aneksasi Israel terhadap Palestina. Karena, jika dilihat dari hasil-hasil Kerjasama antar kedua negara tersebut tidak adanya poin kesepakatan secara tertulis antara Israel dan Uni Emirate Arab yang menegaskan tentang bagaimana keberlangsungan Palestina, namun hanya disampaikan secara lisan oleh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Pemimpin Uni Emirate Arab. Dengan mengatakan normalisasi tersebut sebagai upaya mengusir Israel dari tepi barat Palestina. Sehingga penulis lebih menegaskan bahwa dalam hal normalisasi tersebut Uni Emirate Arab dan Israel selain berbicara persoalan kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi antar kedua negara, tetapi harus juga lebih menegaskan komitmen dalam upaya menjaga perdamaian di wilayah Kawasan Timur Tengah.

